



LAPORAN

PENDATAAN INDUSTRI
KECIL MENENGAH

2025

Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kota Banjarmasin

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kegiatan Pendataan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kota Banjarmasin Tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi pelaksanaan kegiatan pendataan IKM yang dilaksanakan oleh Bidang Perindustrian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin selama periode Januari sampai dengan Desember 2025. Kegiatan pendataan ini bertujuan untuk memperoleh data IKM yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi sebagai dasar dalam mendukung penyusunan kebijakan, pembinaan, serta pengembangan sektor industri kecil dan menengah di Kota Banjarmasin.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini tentunya masih terdapat berbagai kekurangan dan kendala. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan dan penyempurnaan kegiatan serupa di masa yang akan datang.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan pendataan ini, khususnya kepada petugas pendataan, pelaku IKM, serta seluruh pihak terkait yang telah berpartisipasi dan memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan ini.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menjadi bahan informasi dan referensi dalam mendukung pengembangan sektor IKM di Kota Banjarmasin.

Banjarmasin, 5 Januari 2026

Kepala Dinas
Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kota Banjarmasin



ICHROM MUFTEZAR, SSTP, M.Si
NIP. 19810331 199912 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung perumusan kebijakan berbasis data di sektor perdagangan dan perindustrian, ketersediaan data Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi menjadi kebutuhan yang sangat penting. Data IKM tidak hanya berfungsi sebagai dasar perencanaan program pembinaan dan pengembangan usaha, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi terhadap efektivitas kebijakan yang telah dilaksanakan.

Seiring dengan dinamika perkembangan usaha IKM di Kota Banjarmasin, diperlukan upaya pendataan yang komprehensif untuk memperoleh gambaran riil kondisi IKM di lapangan. Pendataan ini mencakup berbagai aspek, antara lain profil usaha, tenaga kerja, kapasitas produksi, serta pemasaran. Dengan data yang valid dan terstruktur, Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Untuk mendukung pelaksanaan pendataan secara efektif dan efisien, digunakan aplikasi SIDIN Banjarmasin sebagai media pengumpulan dan pengelolaan data. Pemanfaatan aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas data serta mempermudah proses pengolahan dan pemanfaatannya.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk melaksanakan pendataan IKM secara sistematis dan terintegrasi guna menyediakan basis data yang dapat digunakan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan.

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Mengumpulkan data IKM secara menyeluruh di wilayah Kota Banjarmasin;
2. Menyediakan data yang akurat dan mutakhir sebagai dasar perumusan kebijakan;
3. Mendukung pengembangan dan pembinaan IKM berbasis data;
4. Meningkatkan kualitas tata kelola data sektoral di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

1.3. Dasar Hukum

Pelaksanaan kegiatan pendataan IKM ini didasarkan pada berbagai regulasi yang mengatur, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Permenperin Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, Dan Informasin Lain Melalui Sistem Informasin Industri Nasional.

1.4. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan ini meliputi seluruh wilayah administrasi Kota Banjarmasin yang mencakup 5 kecamatan dan 52 kelurahan. Sasaran kegiatan adalah seluruh pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang berada di wilayah tersebut.

Data yang dikumpulkan dalam kegiatan ini mencakup berbagai variabel yang menggambarkan kondisi usaha, antara lain identitas usaha, jenis usaha, tenaga kerja, kapasitas produksi, pemasaran, serta aspek pendukung lainnya. Pendataan dilaksanakan selama periode Januari sampai dengan Desember 2025.

BAB II

PERENCANAAN KEGIATAN

2.1. Perencanaan Kegiatan

Pada tahap perencanaan kegiatan ini, Dinas Perdagangan dan Perindustrian khususnya dari Bidang Perindustrian melaksanakan beberapa tahapan awal kegiatan seperti:

1. Rapat Awal Perencanaan Kegiatan
2. Penyusunan KAK kegiatan
3. Pembentukan dan penyusunan tim kerja kegiatan pendataan
4. Penyusunan instrumen pendataan IKM
5. Pembagian pelaksanaan tugas untuk petugas lapangan
6. Koordinasi dengan pengelola aplikasi Sidin Banjarmasin terkait fitur-fitur yang akan dikembangkan

Tahapan perencanaan kegiatan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pendataan IKM secara keseluruhan. Perencanaan yang matang akan memastikan bahwa setiap aspek kegiatan telah dipersiapkan dengan baik, mulai dari kejelasan tujuan, kesesuaian metode, hingga kesiapan sumber daya yang terlibat. Dengan adanya perencanaan yang terstruktur, potensi kendala yang mungkin muncul di lapangan dapat diantisipasi sejak dini, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Selain itu, tahap perencanaan juga menjadi landasan dalam menjamin kualitas data yang dihasilkan. Penyusunan instrumen yang tepat, pembagian tugas yang jelas, serta dukungan sistem seperti aplikasi SIDIN Banjarmasin akan berkontribusi pada konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan. Dengan demikian, hasil pendataan tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis, tetapi juga memiliki nilai guna yang tinggi dalam mendukung perumusan kebijakan dan program pembinaan IKM di Kota Banjarmasin.

2.2. Perencanaan Sumber Daya

Pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh beberapa jenis sumber daya yang berasal dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagai Tim Kerja Pelaksana Pendataan Industri Kecil dan Menengah dan dari SKPD pendukung seperti Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik selaku SKPD yang mengelola penyediaan aplikasi dan jaringan internet.

Tabel 2.1 Anggota Tim Pendataan IKM

No	Jabatan Dalam Tim	Nama	Jabatan	Tugas
1.	Ketua Tim	Bunga Wantisaliana, ST	Subkoordinator Standarisasi, Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Pencemaran LH	Mengoordinasikan, Memberi arahan Tim dan mengevaluasi pelaksanaan Data Industri Kecil dan Menengah Kota Banjarmasin
2.	Anggota	Ramadhania Meiliantinoor, ST	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	Menganalisis pelaksanaan Data Industri Kecil dan Menengah pada Kota Banjarmasin
3.	Anggota	Muhammad Kamaludin, SE	Analisis Industri	Menganalisis pengembangan inovasi dalam kaitan pelaksanaan Data Industri Kecil dan Menengah pada Kota Banjarmasin
4.	Anggota	Dino Irwanto, SE	Pengawas Industri	Menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan dalam kaitannya terhadap Pengawasan Industri
5.	Anggota	Rosana Lina, S.IP	Penyusun Rencana Bimbingan Teknis Industri	Menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan dalam kaitannya terhadap Rencana Bimbingan Teknis Industri pada Pemerintah Kota Banjarmasin
6.	Anggota	Hamidah Hamdan, SKM	Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan melalui Perjanjian/ Perikatan	Mengolah Data Industri Kecil dan Menengah pada wilayah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.
7.	Anggota	Muhammad Rizqoni Ramadhan, S.I.Kom	Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan melalui Perjanjian/ Perikatan	Mengolah Data Industri Kecil dan Menengah pada wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

No	Jabatan Dalam Tim	Nama	Jabatan	Tugas
8.	Anggota	Ahmad Zikrian Noor, S.T.	Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan melalui Perjanjian/ Perikatan	Mengolah Data Industri Kecil dan Menengah pada wilayah Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.
9.	Anggota	Gusti Audina Anggraini	Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan melalui Perjanjian/ Perikatan	Mengolah Data Industri Kecil dan Menengah pada wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
10.	Anggota	Hidayatul Zahra Retna Kesra, S.M.	Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan melalui Perjanjian/ Perikatan	Mengolah Data Industri Kecil dan Menengah pada wilayah Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.

Selain itu, Pendataan Industri Kecil dan Menengah juga diakomodir pada sub kegiatan Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri

Nasional (SIINas) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 136.800.000,00 untuk kebutuhan Jasa Tenaga Administrasi Perorangan.

Proses pendataan industri kecil dan menengah juga difasilitasi dengan aplikasi pendataan sekaligus aplikasi penyebaran hasil pendataan pada Sidin Banjarmasin (<https://sidin.banjarmasinkota.go.id/>).

2.3. Jadwal dan Tahapan Kegiatan

Tabel 2.2 Timeline Kegiatan Pendataan IKM

Jadwal	1. Perencanaan kegiatan : 23 Desember – 31 Desember 2024 2. Desain : 23 Desember – 31 Desember 2024 3. Pengumpulan data : 1 Januari – 5 Desember 2025 4. Pengolahan data : 8 Desember – 15 Desember 2025 5. Analisis : 22 Desember – 29 Desember 2025 6. Diseminasi Hasil : 30 Desember 2025 – 5 Januari 2026 7. Evaluasi : 30 Desember 2025 – 5 Januari 2026
--------	---

Kegiatan pendataan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dilaksanakan secara berkelanjutan selama periode Januari sampai dengan Desember 2025.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bertahap dan terjadwal guna memastikan seluruh wilayah serta pelaku IKM di Kota Banjarmasin dapat terdata dengan baik. Dalam pelaksanaannya, petugas pendataan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian secara rutin melakukan pengumpulan dan pembaruan data melalui aplikasi SIDIN Banjarmasin.

Untuk menjaga konsistensi pelaksanaan kegiatan dan kualitas data yang dihasilkan, setiap minggu dilaksanakan briefing petugas pendataan sebagai sarana evaluasi pelaksanaan lapangan, penyampaian kendala, serta pemberian arahan teknis terkait proses pendataan. Selain itu, setiap bulan juga dilaksanakan rapat koordinasi tim guna membahas progres capaian kegiatan, monitoring pelaksanaan pendataan, serta langkah tindak lanjut terhadap berbagai permasalahan yang ditemui selama kegiatan berlangsung.

Pada akhir tahun pelaksanaan kegiatan, seluruh data hasil pendataan direkapitulasi dan dilakukan proses validasi akhir sebelum disusun dalam bentuk laporan kegiatan. Rekapitulasi data tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bentuk pelaksanaan pelaporan dan koordinasi data sektor perindustrian di tingkat provinsi.

BAB III

PELAKSANAAN DAN HASIL KEGIATAN

3.1. Pengumpulan Data (metode pengumpulan data yang dilakukan dan pembagian wilayah responden)

Pengumpulan data Industri Kecil dan Menengah (IKM) dilaksanakan melalui dua metode pelaksanaan, yaitu pendataan secara langsung (door to door) ke lokasi usaha milik pelaku IKM serta melalui mekanisme undangan kepada pelaku usaha untuk datang dan dilakukan pendataan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin. Metode ini diterapkan guna mempermudah proses pengumpulan data sekaligus meningkatkan cakupan dan efektivitas pelaksanaan pendataan di seluruh wilayah Kota Banjarmasin.

Dalam pelaksanaannya, proses pengumpulan data menggunakan aplikasi SIDIN Banjarmasin sebagai media utama input dan pengelolaan data. Seluruh formulir dan variabel informasi yang dibutuhkan dalam pendataan telah tersedia di dalam aplikasi tersebut dan hanya dapat diakses oleh petugas pendataan yang memiliki hak akses. Penggunaan aplikasi ini bertujuan untuk menjaga keamanan data, mempermudah proses input, serta meningkatkan konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan.

Kegiatan pendataan dilaksanakan oleh 5 (lima) orang petugas yang masing-masing ditugaskan pada 5 kecamatan di Kota Banjarmasin. Pembagian wilayah kerja ini dilakukan agar proses pendataan dapat berjalan lebih terarah dan optimal sesuai cakupan wilayah masing-masing petugas. Sebelum dilakukan pendataan lapangan, pelaku usaha terlebih dahulu diminta untuk mengisi formulir awal melalui Google Form yang telah disediakan. Data awal tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar acuan dan bahan verifikasi bagi petugas dalam melaksanakan proses pendataan secara langsung kepada pelaku usaha yang bersangkutan.

3.2. Pengolahan dan verifikasi data

Data hasil pendataan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang telah dikumpulkan oleh petugas selanjutnya diolah melalui aplikasi SIDIN Banjarmasin sebagai sistem utama pengelolaan data. Proses pengolahan dilakukan dengan memastikan seluruh data yang diinput telah sesuai dengan format dan variabel yang ditentukan dalam instrumen pendataan. Pengelolaan data secara terintegrasi melalui sistem ini bertujuan untuk mempermudah proses penyimpanan, pencarian, pemutakhiran, serta penyajian data IKM secara lebih efektif dan terstruktur.

Dalam proses pengolahan, data IKM diklasifikasikan berdasarkan wilayah administrasi sesuai kode wilayah administrasi pemerintahan yang mengacu pada ketentuan Kementerian Dalam Negeri terkait kode dan data wilayah administrasi pemerintahan. Selain itu, data usaha juga diklasifikasikan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sesuai jenis kegiatan usaha masing-masing pelaku IKM. Pengklasifikasian tersebut dilakukan untuk menghasilkan data yang lebih sistematis, seragam, dan mudah dianalisis dalam mendukung kebutuhan perencanaan maupun pembinaan sektor industri kecil dan menengah.

Setelah seluruh data terinput secara lengkap ke dalam sistem, dilakukan proses verifikasi oleh ketua tim pendataan. Tahapan verifikasi bertujuan untuk memastikan kesesuaian, kelengkapan, dan konsistensi data yang telah dikumpulkan oleh petugas lapangan. Apabila ditemukan data yang belum sesuai atau belum lengkap, maka data akan dikembalikan kepada petugas untuk dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. Data IKM selanjutnya dinyatakan valid setelah seluruh proses pemeriksaan dan verifikasi selesai dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

3.3. Hasil dan Penyajian Data

Hasil kegiatan pendataan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Tahun 2025 memberikan gambaran mengenai kondisi dan sebaran pelaku usaha IKM di Kota Banjarmasin. Data yang berhasil dikumpulkan dan divalidasi melalui aplikasi SIDIN Banjarmasin selanjutnya diolah dan disajikan dalam bentuk tabulasi serta rekapitulasi data untuk mempermudah proses analisis dan pemanfaatannya. Penyajian data dilakukan secara sistematis agar dapat memberikan informasi yang jelas terkait karakteristik dan distribusi IKM di setiap wilayah administrasi.

Pada Tabel 3.1 dapat dilihat Data Industri Kecil Menengah secara Kumulatif mulai tahun 2021 s.d 2025:

Tabel 3.1 Data Kumulatif Industri Kecil Menengah

No.	Daftar Data	2021	2022	2023	2024	2025	Pertumbuhan	Persentasi Pertumbuhan (%)
1	Unit Usaha (Buah)	3.103	3.199	3.379	3.559	3.749	190	6,123
2	Tenaga Kerja (ORG)	32.206	32.502	32.793	33.182	33.556	374	1,161
3	Nilai Investasi (Rp. 000)	1.398.782.954	1.401.713.033	1.404.290.197	1.406.854.157	1.409.437.777	2.583.620	0,185
4	Nilai Produksi	3.049.183.710	3.093.335.358	3.105.613.258	3.131.782.678	3.194.569.564	62.786.886	2,059

	(Rp. 000)							
5	Nilai Bahan Baku (Rp. 000)	2.223.105.860	2.237.180.039	2.241.614.793	2.250.859.965	2.272.100.199	21.240.234	0,955

Jumlah unit usaha IKM di Kota Banjarmasin pada tahun 2024 tercatat sebanyak 3.559 unit, dan meningkat menjadi 3.749 unit pada tahun 2025. Dengan demikian, terjadi penambahan sebanyak 190 unit usaha, atau mengalami pertumbuhan sebesar 6,1persen. Pertumbuhan jumlah unit usaha ini merupakan indikator yang sangat positif, karena menunjukkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan industri kecil dan menengah. Pada Tabel 3.2 dapat dilihat jumlah IKM per wilayah Kecamatan di Kota Banjarmasin:

Tabel 3.2 Jumlah Industri Kecil Menengah menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Tahun		
		2023	2024	2025
1.	Banjarmasin Selatan (63.71.01)	675	710	749
2.	Banjarmasin Timur (63.71.02)	623	653	696
3.	Banjarmasin Barat (63,71.03)	662	692	653
4.	Banjarmasin Utara (63.71.04)	740	785	824
5.	Banjarmasin Tengah (63.71.05)	679	719	731

Berdasarkan data sebaran jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) per wilayah kecamatan di Kota Banjarmasin tahun 2023–2025, terlihat bahwa jumlah IKM secara umum mengalami peningkatan di hampir seluruh kecamatan. Pada tahun 2025, Kecamatan Banjarmasin Utara menjadi wilayah dengan jumlah IKM tertinggi, yaitu sebanyak 824 unit, meningkat dari 740 unit pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan perkembangan aktivitas usaha yang cukup pesat di wilayah tersebut.

Kecamatan Banjarmasin Selatan juga menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dari 675 unit pada tahun 2023 menjadi 749 unit pada tahun 2025. Sementara itu, Kecamatan Banjarmasin Tengah mengalami kenaikan dari 679 unit menjadi 731 unit pada periode yang sama.

Di Kecamatan Banjarmasin Timur, jumlah IKM meningkat dari 623 unit pada tahun 2023 menjadi 696 unit pada tahun 2025. Adapun Kecamatan Banjarmasin Barat sempat mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 692 unit, namun mengalami penurunan pada tahun 2025 menjadi 653 unit.

Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa perkembangan IKM di Kota Banjarmasin cenderung positif selama periode 2023–2025. Peningkatan jumlah IKM mencerminkan tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat dan potensi pengembangan sektor usaha kecil menengah di masing-masing kecamatan.

3.4. Analisis Hasil Pendataan

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, jumlah unit usaha IKM pada tahun 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 6,1 persen atau terjadi perkembangan jumlah unit usaha IKM dari pada tahun 2024 sebanyak 3.559 unit menjadi 3.749 unit. Peningkatan jumlah unit usaha mencerminkan kemampuan sektor IKM untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi.

Jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor IKM Kota Banjarmasin pada tahun 2024 tercatat sebanyak 33.182 orang, kemudian meningkat menjadi 33.556 orang pada tahun 2025. Dengan demikian, terjadi penambahan tenaga kerja sebanyak 389 orang, atau tumbuh sebesar 1,21 persen.

Pertumbuhan tenaga kerja ini menunjukkan bahwa sektor IKM masih berperan penting dalam menyerap tenaga kerja lokal. Meskipun persentase pertumbuhannya relatif lebih kecil dibandingkan pertumbuhan unit usaha, peningkatan ini tetap memberikan kontribusi positif terhadap pengurangan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, nilai investasi IKM di Kota Banjarmasin pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp.1.404.290.197, dan pada tahun 2025 meningkat menjadi Rp1.406.854.157. Dengan demikian, terjadi kenaikan investasi sebesar Rp2.563.960, atau tumbuh sebesar 0,18 persen.

Pertumbuhan nilai investasi yang relatif kecil ini menunjukkan bahwa ekspansi modal di sektor IKM masih berjalan secara terbatas. Hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasan akses permodalan, kehati-hatian pelaku usaha dalam menambah investasi, atau masih dominannya pola usaha bertahan (survival) dibandingkan ekspansi.

Nilai produksi IKM Kota Banjarmasin pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp.3.105.613.258, dan meningkat menjadi Rp3.131.782.678 pada tahun 2025. Dengan demikian, terjadi peningkatan nilai produksi sebesar Rp26.169.420, atau tumbuh sebesar 0,86 persen.

Peningkatan nilai produksi ini menunjukkan bahwa secara umum aktivitas produksi IKM mengalami pertumbuhan. Meskipun laju pertumbuhannya belum terlalu tinggi, kenaikan ini tetap mencerminkan adanya peningkatan permintaan pasar atau perbaikan produktivitas usaha. Pertumbuhan nilai produksi yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan investasi dapat mengindikasikan bahwa pelaku IKM mampu mengoptimalkan sumber daya

yang sudah ada. Hal ini menunjukkan adanya potensi peningkatan efisiensi produksi, meskipun masih perlu ditingkatkan melalui inovasi teknologi, peningkatan kualitas SDM, dan diversifikasi produk.

Nilai penggunaan bahan baku IKM di Kota Banjarmasin pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp2.241.614.793, dan meningkat menjadi Rp2.250.859.965 pada tahun 2025. Dengan demikian, terjadi kenaikan sebesar Rp9.245.172, atau tumbuh sebesar 0,42 persen.

Peningkatan nilai bahan baku ini sejalan dengan meningkatnya nilai produksi. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas produksi IKM pada tahun 2025 relatif lebih intensif dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, pertumbuhan nilai bahan baku yang lebih rendah dibandingkan nilai produksi dapat mengindikasikan adanya peningkatan efisiensi penggunaan bahan baku atau perbaikan proses produksi.

3.5. Analisis Keterkaitan antar Indikator

Jika dilihat secara keseluruhan, perkembangan IKM Kota Banjarmasin pada periode 2024 2025 menunjukkan hubungan yang cukup konsisten antar indikator. Pertumbuhan jumlah unit usaha diikuti oleh peningkatan tenaga kerja, nilai produksi, dan nilai bahan baku. Namun, pertumbuhan investasi relatif tertinggal dibandingkan indikator lainnya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan IKM lebih bersifat ekstensif, yaitu melalui penambahan jumlah pelaku usaha, dibandingkan pertumbuhan intensif melalui peningkatan skala usaha dan investasi. Oleh karena itu, tantangan ke depan adalah bagaimana mendorong pelaku IKM yang sudah ada untuk naik kelas, meningkatkan kapasitas produksi, serta memperluas akses pasar.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan dan Evaluasi Kegiatan

Secara umum, kegiatan pendataan IKM Tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun terdapat beberapa kendala, kegiatan ini tetap dapat menghasilkan data yang bermanfaat bagi perencanaan dan pengambilan kebijakan. dapat disimpulkan bahwa sektor Industri Kecil dan Menengah di Kota Banjarmasin mengalami pertumbuhan positif pada seluruh indikator utama. Pertumbuhan paling signifikan terjadi pada jumlah unit usaha, sedangkan pertumbuhan investasi masih relatif rendah. Meskipun demikian, peningkatan nilai produksi dan penyerapan tenaga kerja menunjukkan bahwa sektor IKM tetap berkontribusi nyata terhadap perekonomian daerah. Untuk mendorong pertumbuhan IKM yang lebih berkualitas dan berkelanjutan, diperlukan langkah-langkah strategis, antara lain:

1. Peningkatan akses permodalan investasi bagi pelaku IKM.
2. Penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendampingan usaha.
3. Dukungan teknologi dan peralatan produksi untuk meningkatkan efisiensi.
4. Pengembangan pasar dan promosi produk IKM, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Adapun beberapa hal yang perlu di perbaiki dan rencana tindak lanjut yang dapat dilaksanakan adalah :

1. Evaluasi petugas pendata dalam ketepatan waktu dalam penyampaian laporan bulanan,
2. Mengkaji ulang terkait penambahan data terhadap perubahan kategori pada KBLI 2020 menjadi KBLI 2025.